



# Buletin Parlementaria

Nomor 1006/II/V/2018 • Mei 2018



## DPR Jihad Perangi Narkoba

TIDAK  
DIPERJUAL  
BELIKAN



DPR Ajak Buruh Kawal Rekomendasi Panja TKA



Ketua DPR RI Bambang Soesatyo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua DPD RI, Menteri Kesehatan, dan Kepala BNN memperlihatkan barang bukti penyelundupan narkoba di Silang Monas, Jakarta

## DPR Jihad Perangi Narkoba

**Ketua DPR RI Bambang Soesatyo kembali meminta semua pihak untuk tidak memberikan ruang bagi peredaran narkoba di Indonesia. Palsinya, meski aparat berwenang sudah melakukan berbagai upaya penegakan hukum terhadap para bandar, pengedar serta pengguna narkoba. Namun hingga kini penyelundupan dan peredaran narkoba masih tinggi di Indonesia.**

“ Saya sudah berkali-kali menyerukan jihad melawan narkoba. Ini butuh dukungan semua pihak. Bukan hanya dari aparat hukum saja, melainkan yang paling utama dari masyarakat sekitar. Jangan ragu melaporkan kepada aparat hukum jika menemukan pihak-pihak yang dicurigai terlibat dalam lingkaran narkoba,” ujar Bamsuet, sapaan akrabnya, saat menghadiri pemusnahan barang bukti 2,6 ton narkoba jenis sabu bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Kepala Badan Narkotika Nasional Heru Winarko, di silang Monas, Jakarta, Jumat (4/5).

Lebih lanjut Bamsuet menjelaskan



Foto : Jaka/hr

## Keberhasilan aparat menggagalkan penyelundupan narkoba itu menjadi bukti nyata keberhasilan pemerintahan Jokowi - JK dalam menjaga masa depan bangsa

agar revisi UU Narkotika bisa segera kita bahas. Kita perlu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, dimana peredaran, perdagangan, maupun penyelundupan narkoba sudah semakin canggih. Bandar dan sindikatnya juga antar negara. Saya ingin revisi UU Narkotika bisa menjawab berbagai tantangan tersebut,” pungkask Bamsuet.

Pada kesempatan itu, Bamsuet juga mengapresiasi kerja keras BNN, TNI AL, Bareskrim Polri, Ditjen Imigrasi, maupun aparat lainnya yang saling bahu membahu untuk menggagalkan penyelundupan narkoba ke Tanah Air. Dari proses pengintaian dan pengejaran tak kenal lelah, hingga akhirnya 2,6 ton narkoba bisa diamankan.

“Keberhasilan aparat menggagalkan penyelundupan narkoba itu menjadi bukti nyata keberhasilan pemerintahan Jokowi - JK dalam menjaga masa depan bangsa. Bukan hanya melakukan tindakan hukum terhadap pedagang dan korban, namun juga sudah dilakukan pencegahan sejak di pintu masuk wilayah Indonesia,” papar politisi Partai Golkar itu.

Sementara itu, Kepala BNN Heru Winarko menyadari bahwa tugas BNN ke depan cukup berat. Pasalnya masih banyak peredaran narkoba yang belum berhasil terungkap, terutama yang berasal dari luar negeri. Meski demikian, pihaknya tidak akan pernah lelah untuk terus mengibarkan bendera perang terhadap peredaran narkoba di Indonesia.

Selain memperkuat barisan-barisan pengamanan di daerah-daerah perbatasan Indonesia yang menjadi pintu penghubung Indonesia dengan negara lain. Baik perbatasan di laut maupun di darat.

“Kami juga memperkuat barisan pencegahan ke desa-desa dan kampung-kampung, bahkan sampai ke Posyandu. Tujuannya tidak lain adalah untuk memperkenalkan jenis-jenis narkoba sekaligus bahaya yang mengancam di belakangnya,” pungkasknya. ■ **ayu/sf**



### PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

### WAKIL KETUA PENGARAH

Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

### PIMPINAN PELAKSANA

Y.O.I Tahapari, S.H, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

### PIMPINAN REDAKSI

Drs.Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

### WK. PIMPINAN REDAKSI

Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak),

Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis),

Nita Juwita, S.Sos (Kasubag MedSos dan Website)

### REDAKTUR

Suciati, S.Sos, Sofyan Efendi

### SEKRETARIS REDAKSI

Hasri Mentari, Guntur Dewanto

### ANGGOTA REDAKSI

Mastur Prantono, Agung Sulistiono, SH,

Erman Suhendri, S.Sos.I, Erlangga Panji Samudro, S.I.Kom

Rahayu Setiowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske

Patuli, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko,

Ria Nur Mega, Taufan Syahrullli

### REDAKTUR FOTO

Eka Hindra, Iwan Armanias

### FOTOGRAFER

Soepardi, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah,

Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana,

Arief Rachman, R. Kresno P.D Moempoeni,

Azka Restu Fadilah

### ADMINISTRASI

Luthfi Suci Nur 'Aini, Damar Maulana Taher, Geraldidi Opie

### ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA

Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI

Gedung Nusantara II Lt. 3

Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta

Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341,

e-mail: bag\_media@dpr.go.id, www.dpr.go.id/berita

## PENERBITAN

### PIMPINAN PENERBITAN

Drs. Sunardi, M.M (Kabag Penerbitan)

### PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

### PHOTOGRAFER ART

Friederick Munchen

### DESAIN GRAFIS

Dito Sugito

### STAF PRODUKSI

Subadri, S.E, Barliansyah,

Fathurahman, Abdul Kahfi, S. Kom,

### PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

Eko Priyanto, S.E (Kasubag Distribusi)

### KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Maria Dumaris Simanjuntak, S.E, Yudi Kresna

### ADMINISTRASI

Sjaefudin, S.Sos

### STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Arif Lamin, Yuliana Puspita

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag\_penerbitan@dpr.go.id

ISI BERITA DAN MATERI FOTO  
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN  
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN  
HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

bahwa jihad memerangi narkoba sudah dilakukan dari hulu sampai hilir. Aparat di wilayah perbatasan maupun intelijen semakin kuat. Walaupun memang masih belum sempurna, namun akan terus ditingkatkan.

Salah satu upaya yang dilakukan DPR RI adalah segera membahas revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Revisi UU Narkotika sangat diperlukan guna memberikan kepastian hukum lebih lanjut. Beberapa diantaranya menyangkut pelaksanaan eksekusi hukuman mati agar ada efek jera.

“DPR RI sudah mendorong pemerintah



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah didampingi Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Hany Tahapari saat menerima 272 pelajar Kawah Kepemimpinan Pelajar Direktorat Pembinaan SMA di Gedung DPR RI

## Hardiknas Menjadi Momentum Refleksi Pendidikan Indonesia

**Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan momentum, Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) semestinya menjadi refleksi bagi seluruh bangsa Indonesia. Salah satu cita-cita luhur bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga kualitas pendidikan merupakan kunci utama meningkatkan kecerdasan bangsa.**

**M**enurutnya, salah satu yang krusial ialah pendidikan karakter bagi generasi muda. Bagaimana karakter seorang pemimpin ditanamkan sejak dini, sehingga bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang berjiwa besar.

“Anak-anak muda hatinya masih bersih, tinggal kita isi. Ini waktu yang tepat bagi mereka untuk belajar banyak,

sehingga harus ada dorongan secara besar-besaran,” ungkap Fahri usai menerima 272 pelajar peserta Kawah Kepemimpinan Pelajar Direktorat Pembinaan SMA di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (2/5).

Fahri mengajak generasi muda agar merubah *mindset* dari tabuh politik menjadi *excited*. Ia menambahkan, dengan pendidikan karakter dan mentalitas yang

tangguh, mereka dapat berpolitik dengan baik, tanpa merugikan pihak lain.

“Ini juga bagian dari tugas bersama, bagaimana politik menjadi menarik. Mereka sangat ingin mengerti politik tapi dianggap kotor, jelek, kontroversial dan sebagainya. Padahal, itu harus kita perbaiki supaya saripati dan pikiran anak-anak terbaiklah yang menjadi pemimpin masa depan, bukan orang yang sisa-sisa,” lanjut Fahri.

Pimpinan DPR Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat itu menambahkan, lahirnya pergerakan-pergerakan revolusioner di dunia justru dimulai dari gerakan politik yang saat ini justru diabaikan.



Foto : Jayaedi/hr

“Pemimpin kurang berbicara, kurang ekspresif, orang menganggap berbicara itu tabuh, padahal semua revolusi dan pembentukan negara dimulai dari pemimpin yang bisa berbicara dan menyakinkan masyarakat. Jika pemimpin *enggak* bisa meyakinkan masyarakat berubah, perubahan tidak akan terjadi dengan cepat,” tegasnya.

Kepada seluruh peserta didik, Fahri juga berpesan agar senantiasa menjaga kesehatan jasmani dan rohani, karena bagaimanapun di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat.

“Ini waktu emas kalian untuk menyerap ilmu pengetahuan, perkuat badannya dan membaca buku yang banyak, asah jiwanya jangan gampang dan kecewa, karena jiwa yang kuat akan menjadi pemimpin disegala bidang yang akan ditempuh,” imbau Fahri seraya memberikan motivasi kepada ratusan siswa-siswi yang hadir dari 34 provinsi di seluruh Indonesia itu. ■ **ann/sf**

# Sistem Pendidikan Nasional Harus Sinergis

**Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan berpesan di Hari Pendidikan Nasional yang diperingati setiap 2 Mei harus menjadi pemacu agar kualitas pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik. Ia menuturkan sistem pendidikan Indonesia ke depan harus terprogram secara strategis. Jangan sampai pola ujian kompetensi dan seleksinya berubah setiap tahun, seperti yang terjadi tahun ini, banyaknya keluhan terkait sulitnya soal Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).**

“Tahun ini ada semacam aspirasi. Ada yang kesulitan menjawab soal UNBK. Kita hanya mengharapkan pada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) terkait pertimbangan dengan kualifikasi soal harusnya jangan sulit atau terlalu mudah sekali, itu kembali ke standarisasi soal nasional,” ujar Taufik kepada wartawan, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (2/5).

Politisi Partai Amanat Nasional itu juga mengingatkan pemerintah agar tidak terlalu sering mengganti kurikulum hanya karena situasi politik. Karena ia meyakini bahwa pendidikan nasional harus dikelola secara sinergis dan berkelanjutan. Sehingga manfaat yang diperoleh dirasakan dalam jangka waktu yang panjang.

“Isu kekinian jangan jadi mengubah pola kerja kementerian. Pola kerja pendidikan tidak bisa dinikmati 1-2 tahun, prosesnya panjang. Sistem seleksi dan kurikulum tidak bisa diganti hanya gara-gara ganti menteri. Tidak bisa pola pendidikan yang instan, tapi harus sinergis dan jangan kebijakannya berubah-ubah,” tuturnya.

Sementara terkait persoalan guru honorer yang kini belum selesai, pemerintah dituntut mampu menyelesaikan hal itu secara bertahap. Semua isu terkait dengan pendidikan tidak bisa diselesaikan dengan sekejap, tetapi membutuhkan penanganan dari berbagai banyak pihak.

“Terkait guru honorer juga, saya kira persoalan sistem pendidikan nasional ini menyeluruh. Honorer K2 belum selesai, pemerintah harus lakukan kajian utuh. Pendidikan tidak bisa selalu mengedepankan aspek hanya semata-mata *millennial*,” tutupnya. ■ **hs/sf**



Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan

Foto : Arief/hr



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima kunjungan DPRD Kabupaten Kendal

## Fadli Zon Janji Perjuangkan Nasib Masyarakat Kendal

**Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon berjanji akan ikut memperjuangkan hak dan nasib masyarakat Kabupaten Kendal, Jawa Tengah yang lahan dan rumahnya menjadi korban pembangunan proyek Jalan Tol Semarang – Batang.**

“ Hari ini saya kedatangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan masyarakat Kabupaten Kendal. Mereka mendampingi perwakilan warga yang lahan dan rumahnya terkena proyek pembangunan jalan tol Semarang – Batang,” ujar Fadli saat menerima pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kendal, Jawa Tengah di ruang rapat pimpinan DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (3/5).

Masyarakat, lanjut Fadli, sejatinya tidak menolak pembangunan jalan tol Semarang-Batang tersebut, namun

mereka meminta ukuran dan harga penggantian lahan dan rumah mereka yang terkena proyek pembangunan jalan tol tersebut agar disesuaikan dengan kondisi real yang ada.

“Ibu Suwarti ini contohnya, rumahnya dengan luas 56 meter terkena proyek pembangunan jalan tol tersebut, namun luas yang tertera hanya delapan meter. Itupun masih ditawarkan menjadi tiga meter. Belum lagi harga ganti rugi yang diberikan sangat jauh dari harga lahan pada umumnya di daerah tersebut.

Ini tentu saja sangat tidak adil. Karena biasanya rumah atau tanah yang terkena proyek pembangunan jalan tol harganya malah di atas harga umum. Tapi ini malah sebaliknya,” paparnya.

Bahkan menurut perwakilan dari masyarakat Kabupaten Kendal, tidak hanya rumah dan lahan yang terkena proyek pembangunan jalan tol itu, namun juga warung-warung yang menjadi mata pencaharian masyarakat selama ini, serta sejumlah Masjid.

Akibat dari belum terselesaikannya proses ganti rugi lahan dan rumah tersebut, tidak sedikit masyarakat Kendal yang kehilangan tempat tinggal karena uang pengganti yang ditawarkan tidak cukup untuk membeli lahan dan rumah yang baru. Hingga kini masyarakat Kendal



Foto: Azka/hr

# SDM Guru dan Sarpras Pendidikan Papua Barat Memprihatinkan

**Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI memberikan perhatian serius pada masalah Sumber Daya Guru (SDM) guru serta sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan di Papua Barat.**

**M**enurut Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih, sampai saat ini masalah pendidikan di Indonesia masih belum menunjukkan tanda-tanda ke arah yang menggembirakan. Berbagai permasalahan klasik seperti masalah karakter, guru, kurikulum, sarana dan prasarana masih terjadi sepanjang tahun 2017 dan awal tahun 2018.

“Persoalan guru utamanya terletak pada beban berat tugas mengajar yang tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan dan perlindungan bagi guru. Persoalan sarana dan prasarana juga menyedihkan,” ungkap Fikri saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI ke Manokwari, Papua Barat, Senin (30/4).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu menjelaskan, dari 1.833.000 ruang kelas di seluruh Indonesia, hanya 470.000 ribu ruang kelas dalam kondisi baik (26 persen), dan hanya 50 persen sekolah yang memiliki alat peraga pendidikan. Ia menilai, kondisi bidang pendidikan di Papua Barat juga belum menggembirakan.

Tim Kunker Komisi X meninjau langsung ke SMA dan SMK yang berada di dalam wilayah jantung kota Manokwari. Dalam tinjauan tersebut, Komisi X menemukan sekolah di daerah itu belum dilengkapi fasilitas praktek yang layak di laboratorim jurusan IPA.

“Dari hasil kunjungan ke beberapa sekolah setingkat SMA dan SMK, masih ditemui beberapa keluhan tentang sarana dan parasarana. Telah kami dengar dan terima, ini untuk menjadi bahan evaluasi kami dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta pemerintah daerah. Memajukan pendidikan adalah tanggung jawab semua pihak,” papar Fikri saat mengunjungi SMK N 3 Manokwari.

Menurut neraca pendidikan daerah yang disusun oleh Kemendikbud diperoleh informasi bahwa persentase anggaran urusan pendidikan di Papua Barat dalam APBD di luar transfer daerah, jauh di bawah 20 persen, hanya sekitar 2-3 persen. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih di bawah rata-rata nasional (69,55), hanya sekitar 61-63.

Sementara itu, uji kompetensi guru, baik guru SD, guru SMP, guru SMA, dan guru SMK Papua Barat hasilnya di bawah rata-rata nasional. Indeks Integritas Ujian Nasional juga masih di bawah rata-rata nasional. Memperhatikan berbagai hal-hal tersebut, pendidikan dasar dan menengah di Papua Barat, perlu mendapat perhatian serius dan seksama. Oleh sebab itu, kesadaran semua pihak dalam membenahi dan memajukan pendidikan sangat diperlukan. ■

eko/sf



Foto: Eko/hr

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih

terpaksa mengungsi ke gedung DPRD Kabupaten Kendal.

Pimpinan DPRD Kabupaten Kendal mengaku bahwa pihak DPRD tidak pernah dilibatkan dalam rencana pemerintah tersebut. Mereka tidak pernah diahak berembug, tiba-tiba mereka langsung membangun dan seakan memaksa.

“Saya akan serahkan pengaduan ini ke Komisi II dan Komisi V DPR RI untuk memanggil kementerian terkait, seperti Badan Pertanahan Nasional, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Semua kejadian di lokasi memang kadang tidak diketahui kementerian, atau juga ada dugaan mereka sengaja tidak tahu. Inilah yang akan kita ambil langkah sesegera mungkin.

Politisi Partai Gerindra ini juga mengapresiasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal yang ikut mendampingi rakyatnya memperjuangkan hak dan nasib mereka. Ia pun berjanji akan ikut membantu memperjuangkan hal yang sudah seharusnya menjadi hak rakyat Kendal. ■ ayu/sf

# DPR Ajak Buruh Kawal Rekomendasi Panja TKA

Ribuan Buruh Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik, dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) menggelar aksi yang berlangsung tertib di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (1/5). Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mengajak kaum buruh secara bersama-sama mengawal rekomendasi Panja Pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang diberikan kepada pemerintah.



Ketua Komisi XI DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi dan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon berorasi di hadapan massa buruh saat peringatan 'Mayday' di depan Gedung DPR RI

“Hasil rekomendasi kita berikan kepada kawan-kawan. Silahkan rekomendasi ini dikawal juga, karena rekomendasi yang sifatnya mengikat antara DPR dan pemerintah,” kata Dede saat orasi dihadapan ribuan massa yang melakukan aksi damai dalam rangka memperingati Hari Buruh. Dalam kesempatan itu, hadir juga Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini, dan Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Syafi'i.

Dede melanjutkan, salah satu rekomendasi krusial Panja Pengawasan TKA yang menjadi kesepakatan DPR dan pemerintah, salah satunya adalah meminta pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan TKA. Menurutnya, rekomendasi tersebut sudah dibuat sejak tahun 2016 namun hingga kini belum dijalankan pemerintah.

“Karena itu, dalam Rapat Kerja Komisi IX dengan Kementerian Tenaga Kerja tiga hari lalu, kami memberikan waktu kepada pemerintah selambat-lambatnya tiga bulan untuk melaksanakan rekomendasi Panja TKA. Jadi ketika kami berikan waktu tiga bulan, pemerintah harus lakukan,” jelas

politisi Partai Demokrat itu.

Dalam raker tersebut, sambung Dede, Komisi IX juga meminta pemerintah segera menerbitkan regulasi turunan dari Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan TKA, terkait peningkatan kualitas pendidikan dan keahlian tenaga kerja Indonesia dan tidak terjadi diskriminasi upah antara pekerja lokal dan pekerja asing.

“Kita memberikan waktu kepada pemerintah selama tiga bulan, payung turunannya seperti apa karena Perpres ini global sekali. Kalau materi turunannya tidak benar juga, baru kita tingkatkan kepada Panitia Khusus,” sambung politisi dapil Jawa Barat itu.

Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menegaskan kehidupan perburuhan semakin suram. Fadli menilai, pemerintah secara terus-menerus mengorbankan kepentingan buruh lokal demi memuluskan kepentingan investasi asing. Tak hanya itu, pemerintah seolah-olah menutup mata atas membanjirnya buruh kasar asal China di Indonesia.

“Pemerintah terus merilis berbagai aturan yang menyerahkan kesempatan

kerja di dalam negeri kepada buruh asing, termasuk untuk pekerjaan-pekerjaan kasar. Ini membuat kehidupan perburuhan menjadi suram. Celakanya, alih-alih melakukan penegakkan hukum yang tegas dan ketat, pemerintah justru kian melonggarkan aturan tentang TKA,” kritisi Fadli.

Politisi Partai Gerindra itu menambahkan, melalui Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan TKA, pemerintah secara gegabah telah menghapus ketentuan mengenai Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Meskipun Perpres masih mempertahankan ketentuan tentang Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). Namun karena tak ada lagi IMTA, maka tidak ada lagi proses 'screening' atau verifikasi terhadap kebutuhan riil TKA.

“Dengan kata lain, semua RPTKA ke depannya otomatis disetujui, apalagi kini seluruh prosesnya dipersingkat tinggal dua hari saja. Menurut saya, kebijakan ini sangat ceroboh dan berbahaya, selain tentu saja melanggar ketentuan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” jelas politisi dapil Jawa Barat itu. ■ ann/sf

# Komisi I Bahas Kerja Sama Alutsista dengan Menteri DAPA Korsel

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Asril Hamzah Tanjung menerima Menteri Bidang Pengelolaan Perlengkapan Pertahanan atau Defense Acquisition Program Administrations (DAPA) Korea Selatan Jeon Jei Guk. Pertemuan tersebut membahas kerja sama di bidang pertahanan, khususnya industri pembuatan alutsista



Foto: Arief/hr

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Asril Hamzah Tanjung didampingi Anggota Komisi I DPR RI menerima Menteri Defense Acquisition Program Administrations (DAPA) Korea Selatan

“Pertemuan ini sangat penting, karena ada dua proyek pembuatan alutsista kita, yaitu pembuatan I kapal selam dan pesawat tempur IFX/KFX. Nah, ada keterlambatan dalam kerja sama ini, karena itu ingin kita tindaklanjuti,” ungkap Asril usai menerima Jeon Jei Guk dan jajarannya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (3/4).

Asril menjelaskan, kerja sama pembuatan jet tempur KF-X/IF-X Indonesia-Korsel adalah program pengembangan pesawat tempur KF-X/IF-X generasi 4.5 yang ditawarkan Pemerintah Korsel kepada Pemerintah RI untuk dikembangkan bersama. Program ini dimulai pada tahun 2011 dengan jangka waktu 10 tahun.

Namun, lanjutnya, ditengah perjalanan kerja sama sempat tertunda, dengan alasan belum adanya persetujuan anggaran dari Parlemen Korsel. Menurut Asril, ada dugaan kuat bahwa penundaan tersebut terkait kekhawatiran negara lain bila KF-X/IF-X berhasil, maka akan jadi pesaing bagi pesawat sejenis dengan

buatan negara lain, namun harganya lebih murah.

“Tadi sudah kita tanyakan hal tersebut, dan Menteri Pertahanan Korsel menyampaikan komitmennya untuk mengejar ketertinggalan yang kemarin, karena kita juga tidak ingin teknologi ini menjadi out of date,” ujar politisi Partai Gerindra itu.

Asril menambahkan, terkait pengadaan alutsista kapal selam, saat ini Indonesia telah menerima Kapal Selam Jenis U-209 KRI Nagapasa-403, sedangkan KRI Alugoro-405 pembuatannya dikerjakan di Indonesia, kerja sama dengan PT PAL Indonesia Persero dan Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) Korea Selatan. Kapal selam ketiga, KRI Ardadadali-404 dalam operasi penyebaran menuju Indonesia dan direncanakan tiba di Armatim Surabaya pada 15 Mei 2018.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Yudha berharap, kerja sama tersebut disertai

dengan alih teknologi ke Indonesia, dengan melibatkan perguruan tinggi dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar kelak Indonesia dapat mencapai kemandirian dalam pengembangan alutsista.

“Kita dengan Korsel sudah berhasil melakukan kerja sama antara PT PAL dan PT DSMI dengan melibatkan Institut Teknologi Surabaya sebagai tenaga ahli. Untuk mengembangkan kerja sama tersebut, kita ingin tidak hanya dinikmati Korsel sebagai penjual, tetapi juga kita bisa menerima transfer teknologi dari mereka,” ujar politisi Partai Golkar itu.

Sementara itu, Menteri DAPA Korea Selatan Jeon Jei Guk mengatakan, kerja sama industri pertahanan Indonesia-Korsel berada di tingkat paling atas, karena terkait sistem pertahanan negara. Ia berharap, program pengembangan teknologi pesawat tempur dapat terus berlanjut pada tiap periode pemerintahan. Mengingat, kedua negara telah menjalin kerja sama di bidang keamanan lebih dari 30 tahun. ■ ann/sf

# Komisi VIII Berharap UIN Imam Bonjol Tetap Buat Kajian Islam

**Perubahan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol, Sumatera Barat, membuat Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang berharap, agar UIN Imam Bonjol Padang tidak lantas melupakan tugas mereka sebagai pembuat kajian Islam yang komprehensif.**



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengunjungi UIN Imam Bonjol, Sumbar

Foto: Nadia/hr

“Jangan menjadi terlena karena menjadi UIN, maka bergeser perhatian menjadi kajian-kajian umum. Itu sudah ada universitas umum. Mereka tidak boleh bergeser, maka kajian Islam harus menjadi lebih baik,” ungkapnya usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI dengan para Rektor dan Dosen UIN Imam Bonjol Padang, Sumatera Barat, Senin (30/4).

Dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tahun 2015-2019 dirumuskan visi Pendidikan Islam Tahun 2015-2019 adalah “Terwujudnya Pendidikan Islam yang unggul, moderat, dan menjadi rujukan dunia dalam integrasi ilmu agama, pengetahuan dan teknologi”.

Terwujudnya Pendidikan Islam yang unggul (kompetitif) dapat dimaknai dengan penyelenggaraan model Pendidikan Islam yang berkualitas dan berdaya saing, responsif terhadap perkembangan tradisi keilmuan Islam

dalam dinamika peradaban dunia modern dan membangun sikap inklusif dalam beragama.

Di sisi lain, menurut politisi Partai Keadilan Bangsa itu, UIN Imam Bonjol masih memiliki banyak persoalan, diantaranya sarana prasarana, hingga fasilitas yang masih membutuhkan banyak anggaran. Selain itu masih ada persoalan pembayaran tunjangan kinerja para tenaga pengajar di lingkungan Kementerian Agama RI.

Anggota Komisi VIII DPR RI Choirul Muna pun menyoroti hal tersebut. Menurutnya, kesejahteraan para dosen atau guru terkait tunjangan kinerja yang ada di lingkungan Kementerian Agama RI telah menjadi fokus utama dari Komisi VIII DPR RI.

“Itu banyak yang masih belum mendapatkan tunjangan. Jadi *inpassing* itu tidak ada di sana, hanya gaji pokok saja. Padahal dia sudah mengabdikan bertahun-tahun sebagai PNS. Nah itu perlu kita

pikirkan untuk pagu anggarannya yang ada di sana,” ungkap Politisi Partai NasDem itu.

Sementara itu, Rektor UIN Imam Bonjol Eka Putra Wirman menjelaskan, UIN Imam Bonjol memiliki luas lahan sekitar 63 hektar. Rencananya di lahan seluas itu, 10 gedung akan dibangun menggunakan dana dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

“Dana yang dibutuhkan sekitar Rp365 miliar, sesuai dengan dana yang diberikan SBSN. Bantuan SBSN bersifat *multiyears*. Saya berharap semua ini berjalan dengan baik. Meskipun, sangat disayangkan belum ada Program Studi Umum 1 pun di sini. SDM-nya terdiri 378 dosen dengan kualifikasi pendidikan 49 persen Magister, 28 persen Doktor, 23 persen sedang melanjutkan S3, dengan 11.855 mahasiswa,” tutupnya. ■ *ndy/sf*

## Komisi V Kawal Pembangunan Jembatan Landak 2 Pontianak

**Wakil Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyampaikan bahwa Komisi V DPR RI akan mengawal pembangunan Jembatan Landak 2 Pontianak, Kalimantan Barat, agar bisa berjalan dengan lancar. Peralannya, jembatan tersebut memang vital guna menyelesaikan kemacetan yang terjadi selama ini di kawasan tersebut.**

“Kami ingin memastikan pembangunan jembatan Jembatan Landak 2 berjalan dengan baik sehingga bisa selesai tepat pada waktunya. Karena kita tahu sendiri,

jembatan ini fungsinya sangat vital. Jembatan ini sudah sangat *urgent* sekali untuk diselesaikan supaya menyelesaikan masalah kemacetan di Kota Pontianak,” ungkap Lasarus saat memimpin Tim

Kunker Komisi V DPR RI ke Provinsi Kalimantan Barat, Senin (30/4).

Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, Jembatan Landak 2 harus dipastikan seluruh pembangunannya berjalan dengan lancar. “Ada kewajiban pemerintah kota di sini terkait dengan pembebasan lahan, ada kewajiban pemerintah pusat terkait pembangunan konstruksi jembatan itu sendiri. Dan domain APBN itu pengawasan dari kami,” imbuh Lasarus.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Muhidin Mohamad Said mengungkapkan, untuk pengerjaan Jembatan Landak 2 yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hingga saat ini tidak ada masalah.

# Ramai Peminat, IAIN Ternate Butuh Pengembangan Kampus

**Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate, Maluku Utara membutuhkan pengembangan kampus. Peralnya, hingga kini tercatat 1500-an lebih calon mahasiswa yang sudah mendaftarkan diri ke IAIN Ternate. Namun kapasitas ruang belajar hanya memungkinkan menerima sekitar 1150-an mahasiswa baru.**

**K**endala terbatasnya ruang kuliah tersebut menjadi salah satu aspirasi yang diterima Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily saat meninjau Kampus IAIN Ternate, di Maluku Utara, Senin (30/4).

“Infrastruktur kampus berupa ruang kuliah, sarana dan prasarana pendukung di IAIN Ternate masih terbatas hingga disiasati waktu perkuliahan harus dimulai dari jam 07.00 pagi sampai jam 23.00 malam,” ungkap Ace, usai menggelar pertemuan dengan Rektor IAIN Ternate didampingi para pemangku kepentingan terkait.

Di sisi lain, politisi Partai Golkar ini menambahkan bahwa Kementerian Agama mendorong agar IAIN Ternate mampu mencapai target jumlah 5000 mahasiswa, namun akan sulit rasanya target tersebut



Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily saat meninjau kampus IAIN Ternate, Maluku

Foto: Oji/hr

tercapai jika dukungan sarana dan prasarana belum mencukupi.

“Jika dengan jumlah mahasiswa saat ini sekitar 3800 saja, sudah penuh ruang kuliah dari jam 07.00 pagi sampai 23.00 malam. Maka untuk menampung 5000 mahasiswa membutuhkan ruang kuliah tambahan,” jelas Ace.

Legislator asal dapil Banten ini mengatakan bahwa IAIN Ternate memiliki fungsi strategis dalam mengembangkan peradaban Islam, dan mencetak cendekiawan, intelektual, pemimpin muslim yang memberikan sumbangsih bagi bangsa dan negara.

“Kedatangan Tim Kunker Komisi VIII DPR RI diharapkan mempermudah dan

mempercepat respon dalam mencari solusi berbagai persoalan di IAIN Ternate,” imbuhnya.

Sementara itu, Rektor IAIN Ternate Samlan Ahmad memaparkan bahwa pihaknya sudah menemukan dan menyiapkan lahan untuk pengembangan kampus 2 dan 3 IAIN Ternate seluas 5,5 hektar. Namun hingga saat ini belum memperoleh dukungan alokasi anggaran dari pemerintah pusat.

“Tahun 2017 lalu kami memperoleh anggaran Rp25 miliar, dan berharap pada 2018 naik menjadi Rp50-100 miliar, agar kami bisa segera mengembangkan kampus 2 dan 3,” harap Samlan.

Pihaknya sangat mengharapkan Tim Kunker Komisi VIII DPR RI bisa menjadi jembatan dalam realisasi dukungan sarana dan prasarana kampus IAIN Ternate. “Kampus kami dengan 3 Fakultas dan 1 Program Pasca Sarjana memiliki visi menjadi perguruan tinggi Islam berbasis riset dalam pengembangan masyarakat kepulauan,” papar Samlan.

Selain persoalan kapasitas ruang kuliah, terbatasnya SDM baik jumlah dosen (kuantitasnya) maupun kualitasnya juga menjadi sorotan Komisi VIII DPR RI. Dosen Doktor dan S2 baru 25 persen, Guru Besar hanya 3, sementara yang 2 sudah meninggal dan sisa satunya dikaryakan di Jakarta, menjadi faktor tambahan yang menyulitkan pengembangan kampus selama ini.

Turut serta dalam Kunker Komisi VIII DPR RI ke Maluku Utara ini antara lain Diah Pitaloka, Wenny Haryanto, Supriyanto, Siti Mufattahah, Lilis Santika, Ei Nurul Khotimah, dan Achmad Fauzan Harun. ■ oji/sf



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meninjau pembangunan Jembatan Landak 2, Pontianak

“Yang jadi masalah itu, bagaimana melanjutkan jalan penghubung itu ke jalan utama, dan pembebasan lahan itu dilakukan oleh pemerintah kota. Kalau kewajiban Kementerian PUPR sudah tidak

ada masalah,” terang Muhidin.

Meski diharapkan dapat selesai tepat waktu, politisi Partai Golkar itu berharap pembangunan Jembatan Landak 2 ini, terutama jalan penghubungnya mempertimbangkan kontur tanah.

“Tanahnya begitu labil, sehingga perlu timbunan banyak. Ini problem juga. Oleh karena itu, kami minta Kementerian PUPR untuk

membantu. Sehingga ketika selesai, kualitas jalan itu sama dengan standar nasional,” tandas Muhidin. ■ skr/sf

Foto: Singgih/hr

# TKA di Batam Harus Diawasi

**Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron menyoroti Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjung Kasem di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau yang kebersihannya kurang terjaga. Namun yang lebih menjadi perhatiannya adalah banyaknya tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di sana. Ironisnya, mereka sudah bertahun-tahun bekerja di Batam, namun tidak bisa berbahasa Indonesia. TKA ini harus diawasi.**

“Kami melihat di *room control* saja keseluruhannya warga negara Tiongkok dan bahkan sudah tiga tahun bekerja di sini tapi tidak bisa berbahasa Indonesia. Bahkan petunjuk apapun di sana juga berbahasa Tiongkok. Padahal dalam Perpres Nomor 20 Tahun 2018 sudah dikatakan bahwa TKA yang bekerja di Indonesia harus bisa berbahasa Indonesia,” kata Herman saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Batam, Kepri, Minggu (29/4).

Politisi Partai Demokrat ini tak bisa membayangkan bagaimana di daerah-daerah terpencil, karena di tengah kota dan wilayah yang sangat banyak dikunjungi oleh masyarakat saja sudah banyak TKA. Herman pun mempertanyakan untuk apa adanya pembangunan jika tidak memberikan lapangan kerja bagi pekerja lokal. Apalagi dengan kondisi angkatan kerja di Indonesia yang sangat tinggi.

“Kita sedang dalam tahapan bonus demografi. Kita harus cukup mampu

menyediakan lapangan pekerjaan supaya angkatan kerja kita terserap semua. Jangan sampai angkatan kerja kita tinggi, kemudian tuntutan terhadap lapangan pekerjaan tinggi, tetapi kemudian sumber daya kita dieksploitasi. Atau investornya dari asing, kemudian ruang pekerjaannya tertutup karena mereka membawa tenaga kerja dari negara asalnya,” khawatir Herman.

Menurutnya, temuan ini harus menjadi perhatian. Selain secara teknis juga harus menjaga keberlangsungan operasional dari pembangkit listrik yang ada di Kota Batam itu, perlu juga adanya batasan untuk TKA. “Ruang pekerjaan yang potensial untuk membuka ruang kerja baru maupun ruang kerja yang bisa menampung lebih banyak para pekerja dalam negeri ini harus betul betul disiapkan secara cukup,” dorong politisi dapil Jawa Barat itu. ■ azk/sf



Tim Kunker Komisi VII DPR RI meninjau *Room Control* Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjung Kasem, Kepulauan Riau

Foto: Azka/hr



Tim Kunker Komisi IV DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IV Michael Wattimena melihat pohon cengkih afo di kaki Gunung Gamalama, Malut

Foto: Eka/hr

## Komisi IV Kunjungi Pohon Cengkih Afo

**Tim Kunjungan Komisi IV DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Michael Wattimena mengunjungi Pohon Cengkeh Afo yang terletak di Desa Tongole Aer Tege-tege, Kelurahan Marikrubu, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara, Sabtu (28/4). Cengkih Afo yang berada di kaki Gunung Gamalama ini diyakini sebagai pohon cengkih tertua di dunia.**

**P**eninjauan pohon cengkih ini dilaksanakan sebelum meninjau Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate, Maluku Utara. Michael menjelaskan, maksud kunjungan Komisi IV DPR RI ke Maluku Utara adalah ingin mendapatkan gambaran serta menyerap aspirasi masyarakat luas yang merupakan lingkup dan bidang kerja Komisi IV DPR RI.

“Kami berharap, baik pertemuan maupun kunjungan yang telah kami lakukan ini bernilai strategis dan penting dalam kaitannya untuk optimalisasi potensi sumber daya alam lokal guna

peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia, khususnya masyarakat Provinsi Maluku Utara,” kata Michael, usai pertemuan.

Dalam kesempatan ini, Komisi IV DPR didampingi beberapa mitra kerja, diantaranya perwakilan Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, PT. Pupuk Indonesia dan Bulog. Saat memasuki kawasan wisata rombongan disambut Mama Imbah, salah satu anggota komunitas Cengkih Afo dan Gamalama Spices (CAGS).

Saat berada dibawah pohon cengkih yang berusia ratusan tahun dan tertua di dunia itu, Tim Kunker Komisi IV DPR pun langsung ditawarkan untuk mencoba pinang, sirih dan kapur. Segelas sirup pala pun turut dihidangkan. Pembina Komunitas CAGS Kris Syamsuddin berharap, agar semua pihak menjaga dan melestarikan warisan bersejarah ini.

Sementara itu, Michael berharap mitra kerjanya untuk menyiapkan bibit cengkih unggulan serta melanjutkan warisan bersejarah ini dengan lebih meningkatkan mutu dan kualitas cengkih.

■ hr/sf

“ Dahulu kekuatan Provinsi Babel adalah pada tambang timah, tetapi kini telah terjadi pergeseran di masyarakat.

Selain sektor tambang, masyarakat melihat ada potensi yang luar biasa dari sektor pariwisata,” jelas Eni, Senin (30/4).

Politisi Partai Golkar itu menyampaikan, keberadaan tambang di wilayah Babel sedikit ‘terancam’, karena masyarakat kini menyadari bahwa potensi wisata tidak bisa dianggap remeh.

“Diupayakan agar sektor tambang dan wisata di Babel dapat berjalan sesuai harapan. Oleh karenanya, harus ada riset yang nantinya bisa mengetahui secara maksimal tentang potensi Babel,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Komisi VII juga menerima masukan yang berkaitan dengan persoalan listrik. Eni menyebutkan bahwa jumlah kuota listrik di Babel sangat mencukupi.

Sementara terkait rencana pembangunan sambungan kabel bawah laut yang digaungkan sejak lama oleh pemerintah, Eni meminta agar hal itu bukan hanya sebagai wacana belaka. Ia meminta agar pembangunan sambungan bawah laut dapat segera direalisasikan.

“Sumatera merupakan tempatnya energi, kalau dibangun mulut tambang dan disambungkan ke Babel, saya yakin masyarakat akan dapat listrik murah dan bidang industri juga ikut menjadi maju,” harap Eni. ■ dep/sf

## Potensi Tambang Babel Luar Biasa

**Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mempunyai potensi yang sangat luar biasa di bidang tambang, maritim dan kelautan, serta sektor pariwisata. Potensi tambang dan pariwisata di Babel sama kuat. Demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih saat kunjungan kerja ke Pangkal Pinang, Provinsi Babel.**



Tim Kunker Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih meninjau lokasi reklamasi areal bekas tambang di Provinsi Babel

Foto: Azka/hr

## Komisi VII Dukung PGN Medan Salurkan Gas Bumi

**Komisi VII DPR RI selalu mendukung langkah-langkah pemerintah dalam usahanya memberikan energi yang lebih murah untuk digunakan masyarakat, baik komersial maupun rumahan. DPR selalu mendorong pemerintah melalui PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) mewujudkan komitmennya untuk memperluas pemanfaatan gas bumi kepada seluruh lapisan masyarakat.**

“ Saya kira harus kita *support* gerakan pemerintah untuk selalu mencari alternatif yang memungkinkan penghematan dan memudahkan masyarakat untuk *saving cost* karena kita menggunakan gas yang kita produksi sendiri,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Tamsil Linrung bersama Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI meninjau

penyaluran gas perdana ke salah satu perusahaan makanan di Kota Medan, Sumatera Utara, Senin (30/4).

Diketahui, PT. PGN (Persero) Area Medan resmi menyalurkan gas bumi ke CV Cipta Rasa Nusantara, yang memproduksi Bolu Meranti. PGN juga sampai saat ini telah memasok gas bumi ke 20.233 pelanggan di Medan. Dengan rincian 45 industri besar, 904 pelanggan komersial

seperti restoran hingga hotel, serta 19.284 rumah tangga.

Dalam dialog Tim Kunker Komisi VII DPR RI dengan pemilik usaha dan perwakilan PGN, diperhitungkan bahwa dengan menggunakan layanan gas negara, maka harga yang harus dibayarkan lebih efisien 40-50 persen dari sebelumnya memakai LPG. Lebih lanjut Tamsil menginginkan agar masyarakat lebih banyak lagi merasakan fasilitas layanan PGN ini.

“Jaringan untuk rakyat sekitar sini memang sudah ada, tapi belum dari APBN. Masih dianggarkan sendiri oleh PGN. Saya kira APBN akan kita dorong supaya ada yang dialokasikan untuk energi PGN menjangkau masyarakat luas,” pungkas politisi PKS itu.

Sementara itu, Direktur Komersial PT. PGN (Persero) Danny Praditya mengatakan, penggunaan gas bumi PGN oleh Pabrik Bolu Meranti ini dipastikan bisa memberikan efisiensi

# Komisi IV Minta SKIPM Tetap di Kawasan Bandara SMB II

**Komisi IV DPR RI mengapresiasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang sudah menyiapkan 9,7 hektar lahan untuk kantor baru Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Kelas II Palembang, yang terletak di Jalan Soekarno Hatta. Namun lahan itu dinilai cukup jauh dari kawasan Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang.**

**K**etua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo meminta agar SKIPM tetap memiliki kantor atau stasiun pengawasan lalu lintas pengiriman ikan yang berada di kawasan Bandara SMB II Palembang, atau seperti kantor yang di tempati sekarang ini. Pihaknya meminta SKIPM di kawasan Bandara SMB II yang ada saat ini ke depannya jangan sampai tidak difungsikan.

“Pemerintah Sumsel telah menyiapkan lahan seluas 9,7 hektar yang rencananya akan dibangun kantor pusat SKIPM di

bagi industri tersebut. Selama ini, dengan menggunakan LPG tabung 50 kg, pabrik ini harus menggunakan 7-8 tabung seharga Rp 650.000 per tabung.

“Sehingga total pengeluaran bahan bakar untuk produksi per bulan mencapai Rp156 juta. Dengan kebutuhan sebesar itu setiap bulan, jika dikonversi menggunakan



Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo dan Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI ke kantor SKIPM Palembang, Sumsel

Foto: Nita/hr

Jalan Soekarno Hatta, Palembang. Itu ide yang bagus, akan tetapi yang harus diingat adalah jangan sampai SKIPM di Bandara SMB II tidak lagi difungsikan. Sebab konsep karantina sendiri adalah pelayanan untuk masyarakat, juga sebagai penghukuman jika ada pelanggaran,” jelas Edhy saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI ke kantor SKIPM

gas bumi PGN menjadi sebesar kurang lebih 15.101 meter kubik per bulan,” sebutnya.

Dengan harga gas bumi PGN hanya Rp5.496 per meter kubik, maka total pengeluaran Pabrik Bolu Meranti untuk penggunaan gas bumi hanya Rp82,9 juta per bulan. ■ ran/sf

Palembang, Sumsel, Sabtu (28/4).

Politisi Partai Gerindra itu menyerahkan sepenuhnya terkait letak SKIPM di Bandara SMB II itu. Menurutnya, keberadaan SKIPM di bandara merupakan hal yang penting. “Bagaimanapun juga, tidak banyak masyarakat yang tahu, jika membawa ikan di bandara harus masuk ke karantina terlebih dahulu. Maka itu, harus ada pelayanan di bandara,” imbuh Edhy.

Sementara itu, Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Rina menambahkan, pihaknya sangat berterimah kasih kepada Gubernur Sumsel yang sudah menyiapkan lahan untuk pembangunan SKIPM Sumsel.

Ia juga menjelaskan, pada tahun 2017, nilai ekspor yang berasal dari Sumsel sebesar 12,8 juta dolar AS, dengan komoditas utama udang (66,8 persen), paha kodok (18,4 persen), dan sidat (12,4 persen) dengan negara tujuan utama Jepang (43,0 persen), Uni Eropa (20,3 persen) dan Amerika Serikat (18,3 persen).

Sedangkan pada tahun 2018 (periode Jan-Feb), ekspor Provinsi Sumatera Selatan mencapai 1,83 juta dolar AS, atau meningkat sebesar 64,3 persen dengan volume sebesar 450 ton atau meningkat 87,6 persen. “Dibandingkan pada periode sebelumnya yakni tahun 2017, dengan komoditas utama udang, sidat dan paha kodok sangat meningkat, ini adalah menjadi faktor peningkat ekspor di Sumsel,” jelasnya. ■ nt/sf



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Tamsil Linrung didampingi Tim Kunler Komisi VII DPR RI tinjau penyaluran gas PT. PGN, Sumut

Foto: Rizka/hr

# Komisi IV Dukung Peningkatan Anggaran Manggala Agni

**Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendukung peningkatan anggaran dan revitalisasi alat untuk program pemadaman kebakaran hutan oleh Manggala Agni (Galag). Pasalnya, sarana dan prasarana Tim Galag dinilai masih minim.**

“Kami sudah melihat berbagai program dari Manggala Agni Daops Pontianak, Kalimantan Barat ini. Sekaligus melihat simulasi pemadaman hutan dan lahan yang dilakukan dengan sigap oleh Tim Galag. Kami sangat mengapresiasi hal itu,” ujar Daniel saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI mengunjungi Markas Manggala Agni di Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Kalbar, Senin (30/4).

Meski demikian, Daniel beserta Tim Kunker masih menemukan beberapa kendala yang dialami oleh Tim Galag. Salah satunya adalah minimnya jumlah sarana

dan prasarana yang digunakan Tim Galag dalam proses pemadaman kebakaran lahan dan hutan selama ini. Selain itu, kualitas peralatan yang ada juga sangat menurun.

Hal itu menurut Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan (PPIKHL) Wilayah Kalimantan Johnny Santoso, akibat usia alat yang terbilang lama. Sehingga banyak alat yang rusak dan akhirnya harus mengalami tambal sulam untuk perbaikan.

Atas kondisi itulah, maka Johnny berharap agar Komisi IV DPR RI mendorong peningkatan anggaran bagi

Tim Galag Daops Pontianak, Kalbar. Sekaligus mendukung dilakukannya revitalisasi atau perbaruan alat-alat yang digunakan oleh Tim Galag untuk memadamkan kebakaran lahan dan hutan.

Menanggapi hal itu, Daniel dan Tim Kunker Komisi IV DPR RI lainnya seperti Darori Wonodipuro (F-Gerindra), Sulaiman L. Hamzah (F-NasDem), Budisatrio Djiwandono (F-Gerindra), dan Ahmad Yohan (F-PAN) sepakat untuk mendukung peningkatan anggaran sekaligus pembaharuan alat-alat bagi Tim Galag.

Mengingat Tim Galag selama ini berada di garda terdepan dalam menjaga kawasan dan fungsi hutan dan lahan, dalam rangka menunjang kehidupan, menjaga hutan untuk sosial ekonomi masyarakat, serta menjaga flora fauna dan ekosistem hutan.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro meminta pemerintah mengangkat personel Manggala Agni menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). “Kami tadi mendapat aspirasi terkait nasib dari personel Manggala Agni yang hingga kini belum juga diangkat menjadi ASN,” ujar Darori.

Menurut politisi Partai Gerindra itu, keahlian atau keterampilan personel Tim Galag sudah tidak perlu diragukan lagi. Oleh karena itu, sudah sepantasnya negara mengapresiasi kinerja mereka. Salah satunya dengan meningkatkan statusnya menjadi PNS.

“Saat ini ada sekitar 1900 personel Galag yang sudah bekerja belasan tahun dan sudah teruji kinerjanya, tapi belum juga diangkat jadi PNS. Ini sebenarnya seperti janji saya terdahulu saat masih menjadi Dirjen di Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Saya berjanji untuk memperjuangkan status mereka menjadi PNS. Tapi sampai sekarang belum juga terwujud,” tambah Darori.

Pada kesempatan itu, Tim Kunker Komisi IV juga menyaksikan simulasi penggunaan peralatan pada areal latihan dan simulasi pemadaman, meninjau sarana dan prasarana yang digunakan Tim Galag, serta meninjau bengkel cuka kayu, demplot pengolahan lahan tanpa bakar (PLTB), dan melakukan penanaman di demplot percontohan kebun buah Galag Daops Pontianak. ■ ayu/sf



Foto: Ayu/hr

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan melakukan simulasi pemadaman kebakaran hutan, Kalbar

# Tol Manado - Bitung Ambruk, Komisi V Bentuk Panja

**Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI dipimpin Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis meninjau lokasi ambruknya proyek Tol Manado-Bitung di KM 13, Desa Tumuluntung, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Senin (30/4). Fary mengaku prihatin atas kejadian yang merenggut korban tersebut.**

**S**eiring dengan banyaknya kecelakaan kerja pada proyek strategis nasional, Fary menilai perlu diadakan moratorium dan sertifikasi ulang terhadap BUMN infrastruktur. “Ada yang tidak berjalan dengan baik pada BUMN ini, pembinaannya lemah. Bisa dikenakan sanksi menurut undang-undang,” kata Fary disela-sela peninjauan.

Politisi Partai Gerindra ini sangat menyangkan terjadi kecelakaan kerja ini. Menurutnya insiden ini akan menghambat proyek pembangunan infrastruktur yang semula ditargetkan rampung dan dapat beroperasi pada 2019 mendatang. Pihaknya meminta PT. Wijaya Karya (WIKA), sebagai kontraktor pada proyek ini, agar lebih memperhatikan keselamatan kerja seluruh tenaga kerjanya di proyek tersebut.

“Pekerja proyek tidak boleh berada di bagian bawah bangunan bila sedang dilakukan pekerjaan di bagian atas karena bisa membahayakan keselamatan. Aturan ini tidak bisa dilanggar,” tegasnya.

Terhadap insiden ini, Fary menjelaskan pihaknya masih menunggu hasil investigasi yang sedang dilakukan Puslabfor Mabes Polri dan Komite Keselamatan Konstruksi (KKK) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Hasil investigasi sangat diperlukan untuk mengetahui penyebab ambruknya *box overpass* itu.

“Sudah 13 hari kejadian ini berlalu. Kami masih menunggu hasil investigasi dari Polri dan Komite Keselamatan Konstruksi. Jangan sampai kejadian ini terulang kembali di Indonesia,” harap politisi dapil Nusa Tenggara Timur II ini.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menyangkan



Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis memberikan keterangan kepada pers, terkait ambruknya proyek tol Manado - Bitung, Sulut

Foto: Soerya/hr

**Komisi V DPR RI masih menunggu hasil investigasi yang sedang dilakukan Puslabfor Mabes Polri dan Komite Keselamatan Konstruksi (KKK) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Hasil investigasi sangat diperlukan untuk mengetahui penyebab ambruknya *box overpass* itu.**

ketidakhadiran Direktur Utama PT. WIKA. Padahal, kehadiran Dirut PT. WIKA guna mengambil jalan keluar dari persoalan ini. Untuk itu, pihaknya akan kembali memanggil pihak dan kementerian terkait dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen.

“Kita akan panggil kembali menteri terkait dan akan mendorong Panitia Kerja (Panja) ini akan tetap terbentuk. Jika tidak maka kita akan bentuk Panitia Khusus

(Pansus),” imbuh politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.

Di tempat yang sama, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XV Riel Mantik menjelaskan, seluruh pekerjaan proyek tol Manado-Bitung termasuk pekerjaan *box overpass* telah dikerjakan berdasarkan prosedur pekerjaan yang ditentukan.

“Kami selalu melaksanakan pekerjaan berdasarkan tahapan yang ada di SOP. Sebagai informasi, *box overpass* ini adalah bangunan yang ketiga. Dua *box overpass* yang lainnya telah lebih dulu selesai,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Teknik PT. WIKA untuk proyek Tol Manado-Bitung Fajar menerangkan, penyebab ambruknya *box overpass* sedang diinvestigasi oleh Polda Sulut. “Ini sementara diinvestigasi. Sampel-sampel sudah diserahkan ke polisi. Tahapan demi tahapan sedang dilakukan. Kami sedang menunggu hasilnya,” katanya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pembangunan jalan tol yang menghubungkan Manado dan Bitung pada ruas KM 13 di Desa Tumuluntung, Minahasa Utara, ambruk pada Selasa (17/4) pukul 14.30 WITA. Akibat kejadian ini 3 pekerja tertimbun material dan 2 orang pekerja meninggal dunia. ■ soe/sf

# Perpanjangan Landasan Bandara Sultan Syarif Kasim Riau Tidak Efisien

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ibnu Munzir saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Riau mengatakan perlu peninjauan kembali masalah perpanjangan landasan pada Bandara Sultan Syarif Kasim Riau. Menurutnya hal tersebut tidak efisien, mengingat kontrak pengelolaan bandara tersebut akan habis di tahun 2025.

“Kalau ingin dikembangkan, lebih baik pada relokasi di bandara yang baru, jadi yang saat ini dimanfaatkan saja dulu sampai 2025 dengan panjang landasan 2640 meter. Kalau sampai 2025 hitungan bisnisnya kurang, karena Angkasa Pura II itu BUMN, orientasinya ke profit, maka harus dihitung nilai investasi dan keuntungannya,” ujar Ibnu di Bandara Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru, Riau, Rabu (2/5).

Dalam sisa tahun pengelolaan sampai 2025, menurut politisi Partai Golkar dan beberapa Anggota Komisi V DPR RI lainnya setuju bahwa Angkasa Pura II lebih baik



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ibnu Munzir (tengah) saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI di Bandara Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru, Riau

Foto: Kresno/hr

memaksimalkan Bandara Sultan Syarif Kasim II yang ada saat ini, karena hal tersebut jauh lebih efisien. Mengingat tahun 2025 bandara akan direlokasi ke tempat lain.

Di samping itu, tambah Ibnu, perpanjangan landasan akan mengalami

beberapa kendala yaitu, pembebasan lahan, tanah cadangan TNI AU, serta adanya tower pemancar di sekitar landasan. Apabila landasan diperpanjang, maka tower tersebut harus dipotong karena melebihi batas tinggi dan jarak aman sekitar landasan. ■ eno/sf

## Danau Sebangau Bisa Mendunia



Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjiyanto berdiskusi dengan Kadis Pariwisata Kalteng

Danau Sebangau di Taman Nasional Sebangau, Palangka Raya, Kalimantan Tengah bisa menjadi destinasi dunia yang menarik. Danau berair hitam ini sangat unik dengan kekayaan flora dan fauna endemik khas Kalimantan. Aksi menyusuri Danau Sebangau bisa dimasukkan ke dalam kalender pariwisata 100 even nasional.

Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI dipimpin Djoko Udjiyanto bersama Kepala Dinas Pariwisata Kalteng Guntur Talijan menyusuri danau unik ini, Minggu

Foto: Huseny/hr

# Perlu Infrastruktur dan SDM untuk Optimalkan Pariwisata Kepri

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Pariwisata telah menetapkan Kepulauan Riau menjadi salah satu dari 10 destinasi pariwisata prioritas yang akan dipromosikan ke tingkat dunia.



Foto: Ria/Ar

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra meninjau Lagoi Bay di Pulau Bintan, Kepri

“Untuk itu, kami berharap Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan pemangku kepentingan kepariwisataan dapat mengoptimalkan program ini dalam pemajuan pariwisata Indonesia dan Kepulauan Riau,” kata Sutan saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI meninjau Lagoi Bay, di Pulau Bintan, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Minggu (29/4).

(29/4). Hanya ada dua danau di dunia yang berair hitam, selain di Palangka Raya ada juga di Brazil. Air hitam merupakan pengaruh akar pohon yang tumbuh liar di danau. Bahkan, warga setempat meminum langsung air danau itu tanpa dimasak.

“Danau ini sangat luar biasa. Begitu tenang dan airnya hitam. Unik sekali. Di sini juga ada hutannya yang belum banyak dijamah manusia. Bisa kita usulkan untuk masuk kalender pariwisata 100 even. Pariwisata nasional tidak boleh hanya di bawah bayang-bayang Bali. Sayangnya, destinasi Sebangau belum didukung anggaran sama sekali. Padahal, potensinya luar biasa,” kata Djoko saat menyusuri danau dengan perahu klotok.

Danau Sebangau yang berdampingan dengan hutan tropis itu, menempati areal seluas 6 ribu hektar. Satwa dan flora endemik Kalimantan hidup di sini,

Menurut politisi Partai Gerindra itu, Pulau Bintan merupakan salah satu destinasi wisata utama yang dekat dengan pintu masuk wisatawan mancanegara ke Indonesia, yaitu Batam.

“Saya melihat ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemajuan destinasi di Pulau Bintan ini. Yaitu infrastruktur transportasi, serta Sumber

seperti orangutan dan anggrek Kalimantan. Kampanye pengenalan Sebangau harus masif dilakukan dengan kemasan yang baik, agar wisatawan asing berdatangan. “Komisi X akan memberi perhatian penuh pada wisata Danau Sebangau,” ucap Ketua Komisi X itu.

Ditambahkan Djoko, untuk menjadi destinasi wisata nasional banyak prasyarat yang harus dipenuhi. Misalnya, akses transportasi dan keamanan yang memadai. Untuk itu, perlu dukungan anggaran signifikan agar Sebangau masuk destinasi nasional bahkan dunia. Air danau ini tidak berbau dan berlumpur karena tak tercemar merkuri, sehingga sehat untuk dikonsumsi. Tak ada aktivitas pertambangan di sini, sehingga lingkungannya sehat. ■ mh/sc

Daya Manusia (SDM) yang kompeten dalam mempromosikan destinasi Pulau Bintan,” jelasnya.

Dijelaskan Sutan, transportasi menuju Pulau Bintan masih sulit, belum nampak juga Kuliner, Karya dan Fashion (K2F) di tempat destinasi. Untuk itu, pihaknya meminta pemerintah daerah untuk menggandeng Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) dalam pemajuan pariwisata.

“Saya belum melihat ada ciri khas pulau Bintan yang ditawarkan, ini harus dihidupkan. Bekraf harus digandeng untuk mengoptimalkan destinasi baru ini,” imbuh politisi dapil Jambi itu.

Sutan berharap, ke depannya bidang Pariwisata bisa dikelola dengan semakin baik, sehingga sektor pariwisata dapat terus memberikan kontribusi untuk pertumbuhan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pariwisata sebagai sektor unggulan dan menjadi sektor pendapatan ekspor, penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha dan infrastruktur.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi X DPR RI Mujib Rohmat. Menurutnya, Kepulauan Riau memiliki kekayaan alam yang luar biasa, salah satunya Pulau Bintan.

“Tapi ada hal-hal yang menjadi perhatian kami yaitu infrastruktur transportasi, SDM yang menunjang untuk mendukung strategi BAS (Branding, Advertasing dan Selling) sebagai bagian dari upaya mencapai target 20 juta wisman yang ditetapkan pada tahun 2019,” jelas politisi Partai Golkar itu.

Untuk diketahui, jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kepulauan Riau pada bulan November 2017 mencapai 168.113 kunjungan. Jumlah itu mengalami kenaikan 3,92 persen dibanding jumlah wisman pada bulan sebelumnya, dimana jumlah wisman pada Oktober 2017 sebanyak 161.770 kunjungan.

Dalam kunjungan ini, turut serta beberapa Anggota Komisi X DPR RI, diantaranya Sofyan Tan (F-PDI Perjuangan), Irene Yusiana (F-PDI Perjuangan), Popong Otje Djundjungan (F-Golkar), Bambang Sutrisno (F-Golkar), Nuroji (F-Gerindra), Rita Zahara (F-Gerindra), Venna Melinda (F-Demokrat), Yayuk Basuki (F-PAN), dan Dewi Coryati (F-PAN). ■ rnm/sf



Foto: Chasbi/hr

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Soepriyatno

Ini berarti banyak sekali pengawasan yang harus dilakukan, terutama barang-barang yang dibawa oleh para tamu khusus. Peninjauan ini berdasarkan negara Indonesia yang sudah darurat narkoba, setiap 2 kali dalam seminggu ditemukan tangkapan narkoba,” ujar Soepriyatno saat memimpin Tim Kunker Komisi XI DPR RI meninjau kantor Bea dan Cukai di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali, Senin (30/4).

Pengawasan itu, tambah Politisi Partai Gerindra itu, terhadap barang-barang yang dibawa oleh tamu melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai. Pasalnya terdapat peraturan perundang-undangan terkait

barang yang bebas diperiksa dan barang yang harus diperiksa. Menurutnya ini penting sekali, agar negara Indonesia tetap aman.

“Jangan sampai kita lengah, apapun itu kita harus waspada. Jangan sampai kegiatan besar ini yang seharusnya bisa kita manfaatkan untuk kepentingan bangsa dan negara, namun dalam pelaksanaannya malah menjadi kurang baik,” tambah Soepriyatno.

Politisi dapil Jawa Timur itu mengatakan, saat ini Bea dan Cukai sedang melakukan proses pengawasan dalam hal-hal tersebut, termasuk pembangunan jalan dan infrastruktur, serta pembukaan hotel yang akan disinggahi para tamu. Semua sudah dalam proses pelaksanaan yang rapi. Pihaknya juga berdiskusi dengan Bea dan Cukai dan Kementerian Keuangan

mengenai acara ini secara menyeluruh.

“Bagaimana peran Bali sebagai tuan rumah dalam pelaksanaan *annual meeting* tersebut, Jangan sampai uang negara yang triliunan rupiah ini manfaatnya sedikit dan menjadi percuma. Semoga dalam pelaksanaannya semua bisa berjalan dengan lancar dan sukses,” tutup Soepriyatno. ■ cas/sf

**Jangan sampai kita lengah, apapun itu kita harus waspada. Jangan sampai kegiatan besar ini yang seharusnya bisa kita manfaatkan untuk kepentingan bangsa dan negara**

## Bea Cukai Bali Diminta Tingkatkan Pengawasan IMF - World Bank 2018

Tim Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Soepriyatno meminta kesiapan Bea dan Cukai Bali dalam pelaksanaan IMF - World Bank Annual Meeting 2018 yang akan diselenggarakan di Nusa Dua, Bali, Oktober 2018 mendatang. Pasalnya, pertemuan tahunan itu nantinya akan dihadiri oleh setidaknya 15 ribu lebih orang asing yang datang ke Indonesia.

## Perkuat Diplomasi, DPR Terima Parlemen Azerbaijan



Foto: Jayadi/hr

Anggota GKSBB DPR RI Hermanto terima kunjungan parlemen Azerbaijan

Anggota Grup Kerja Sama Bilateral (GKSBB) DPR RI - Parlemen Azerbaijan Hermanto menerima kunjungan Parlemen Azerbaijan yang dipimpin Ganira Pashayeva. Dalam pertemuan tersebut, Milli Majlis (Parlemen) Azerbaijan meminta dukungan Parlemen Indonesia terkait perjuangan Azerbaijan untuk merebut kembali wilayah Nagorno - Karabakh yang dikuasai Armenia sejak 1992.

“ Kita harus mendukung kepala daerah yang mempunyai visi seperti itu, dan nantinya ia juga ingin membangun rumah sakit dengan fasilitas yang modern, tidak kalah dengan rumah sakit di Singapura. Kemudian, ia juga akan mendorong masyarakat Indonesia agar menggunakan jasa pelayanan RS di Indonesia,” kata Totok saat memimpin Kunjungan Kerja Baleg DPR RI rapat dengan Pemprov Sumsel dan stakeholder dibidang kesehatan di Palembang, Sumsel, Kamis (26/4).

Selain itu, kata Politisi PAN ini, ada masukan dari Gubernur Sumsel terkait kebijakan pemerintah yang ingin membuat sejumlah Perguruan Tinggi Kedokteran di wilayah timur Indonesia. Menurutnya, pemerintah harus berhati-hati terkait kebijakan ini, jangan sekedar untuk alasan mengatasi ketimpangan di Indonesia timur, malah memberikan solusi yang tidak tepat.

“Menurut saya lebih baik distribusi tenaga kerja dokter ke wilayah timur itu lebih tepat, karena dokter-dokter kita yang telah mengikuti pendidikan umumnya telah terverifikasi. Nah, kalau seandainya dibangun Perguruan Tinggi Kedokteran di wilayah timur dikhawatirkan banyak kelemahan dari segi fasilitas, pengajar dan lainnya,” pungkas Totok.

Sementara itu, Gubernur Sumsel Alex Noerdin, mengatakan, Pemprov Sumsel sendiri telah membangun RS milik pemma yang memiliki fasilitas tercanggih, termmodern tapi tetap gratis untuk rakyat.

“ Kunjungan mereka untuk memperkuat misi diplomatik antara Indonesia – Azerbaijan, salah satunya meminta dukungan baik secara moril maupun politis terhadap keinginan Azerbaijan untuk memperjuangkan wilayah Nagorno – Karabakh dalam sidang PBB mendatang,” ujar Hermanto usai menerima delegasi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (30/4).

Menanggapi hal itu, Hermanto mengatakan Indonesia akan mendukung Azerbaijan untuk mengambil langkah-langkah konkrit dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di Karabakh.

Sebelumnya dalam kunjungan ke Azerbaijan, delegasi GKSB DPR RI menegaskan bahwa bentuk dukungan DPR RI adalah dengan tidak membentuk Kelompok Persahabatan Antar Parlemen dengan Parlemen Armenia sampai dibebaskannya wilayah tersebut dari

# DPR Dukung Pemprov Sumsel Bangun Fakultas Kedokteran Terbaik

**Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Totok Daryanto mendukung rencana Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin yang akan membangun Fakultas Kedokteran tercanggih, termmodern, dan fasilitas terlengkap se-Indonesia. Menurutnya, Gubernur Sumsel memiliki visi untuk membuat pendidikan yang sangat maju dibidang kesehatan.**



Wakil Ketua Baleg DPR RI Totok Daryanto melakukan pertemuan dengan Gubernur Sumsel Alex Noerdin

Foto : Jaka/hr

Dan kedepannya, disebelah RS akan dibangun Fakultas Kedokteran Sriwijaya terbaik se-Indonesia.

“RS ini nantinya akan menjadi *pitching hospital*, barangkali kedepannya akan

bisa bersaing dengan negara-negara lain, kami yakin Bangsa Indonesia ini kalau diberi kesempatan itu mampu. Saya juga berharap kepada DPR agar mendapat dukungan,” tutupnya. ■ jk/sf

cengkraman Armenia. “Kami mendorong supaya terwujudnya perdamaian abadi karena itu amanat konstitusi kita,” paparnya.

Menurut Hermanto, DPR berkomitmen dalam menghormati integritas dan kedaulatan wilayah Azerbaijan serta mendukung penuh implementasi DK PBB 822 (1993), 853 (1993), 874 (1993) dan 884 (1993) terkait penarikan tentara Armenia dari kawasan Nagorno – Karabakh dan menuntut Armenia untuk menghormati kedaulatan dan integritas kawasan Azerbaijan.

Selain dukungan politis, delegasi Azerbaijan juga meminta dibukanya peluang *direct flight* dan *direct trade* dari Indonesia ke Azerbaijan. Hal ini penting untuk meningkatkan volume perdagangan kedua negara. Mengingat, total perdagangan Indonesia – Azerbaijan mengalami penurunan pada tahun 2017,

yakni sebesar 412 juta dolar AS.

“DPR RI mendukung adanya rute penerbangan langsung yang tentunya dapat meningkatkan kontribusi positif bagi pariwisata kedua negara. Kami juga berharap perdagangan kedua negara melalui kerja sama *sister port* antara kedua negara dapat ditingkatkan,” imbuh politisi F-PKS ini.

Kunjungan Delegasi Milli Majlis Azerbaijan kali ini merupakan kunjungan balasan untuk menindaklanjuti sejumlah pembahasan dalam rangka meningkatkan hubungan kerja sama secara bilateral. Dalam kesempatan ini, Parlemen Azerbaijan bahkan didampingi sejumlah akademisi, pelaku bisnis, NGO Azerbaijan untuk mendalami potensi-potensi yang bisa dikembangkan kedua negara. ■ ann/sf



Irtama Setjen DPR RI Setyanta Nugraha memberikan sambutan dalam acara bimtek pengendalian gratifikasi

Foto: Doeh/hr

## Bimtek Pengendalian Gratifikasi Upaya Membangun Integritas

**Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Program Pengendalian Gratifikasi bekerja sama dengan Direktorat Gratifikasi, Deputi Bidang Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bimtek ini sebagai upaya Setjen dan BK DPR RI untuk membangun integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan DPR.**

“Bimbingan Teknis bersama dengan KPK berkenaan dengan pengendalian gratifikasi. Ini merupakan satu bentuk membangun integritas di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI,” papar Inspektur Utama (Irtama) Setjen dan BK DPR RI Setyanta Nugraha, di Teraskita, Cawang, Jakarta Timur, Rabu (25/4).

Totok, panggilan akrab Setyanta juga menyampaikan, dari kegiatan ini diharapkan bisa menghasilkan rumusan regulasi untuk pedoman pengendalian gratifikasi di lingkungan kepegawaian

Setjen dan BK DPR.

“Output yang nanti akan dihasilkan, diharapkan sudah bisa merumuskan regulasi atau pedoman tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan Setjen dan BK DPR. Ini adalah regulasinya sebagai payung hukum untuk mengendalikan gratifikasi di Setjen dan BK DPR,” papar Totok.

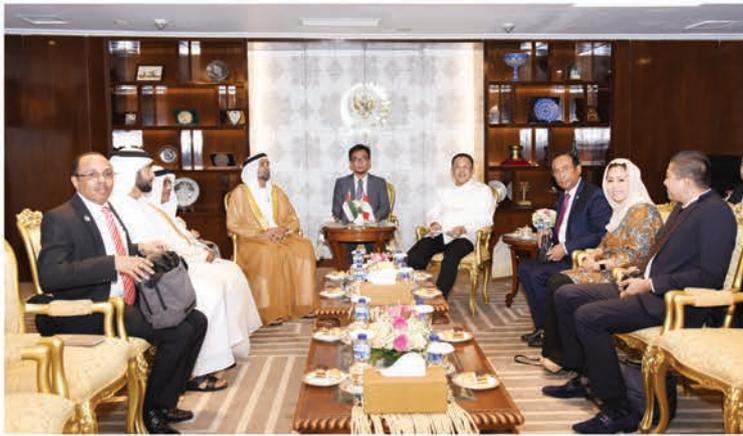
Di kesempatan yang sama, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Setjen dan BK DPR Rahaju Setya Wardani menjelaskan, Pusdiklat berkewajiban untuk meningkatkan kompetensi pegawai khususnya ASN di lingkungan

Setjen dan BK DPR. Oleh karenanya, dalam hal pengendalian gratifikasi dan pelaporan gratifikasi ini, Pusdiklat menyelenggarakan Bimtek guna meningkatkan kompetensi pegawai di unit-unit kerja Setjen dan BK DPR.

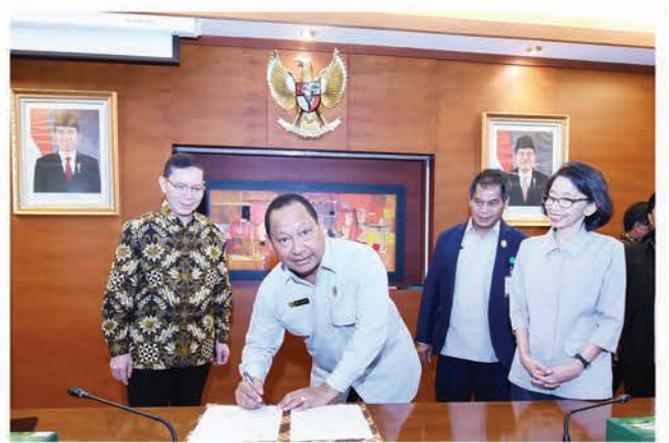
“Pegawai itu harus dibekali dengan pengetahuan, dengan kesadaran dengan satu bimbingan, agar mental jalan pikirnya itu harus tetap mengendalikan gratifikasi,” ujar Rahaju.

Dalam kesempatan itu, Direktorat Gratifikasi Deputi Bidang Pencegahan KPK dalam materi Bimteknya menyampaikan, bahwa gratifikasi merupakan akar terjadinya korupsi. Oleh sebab itu, bagi yang mengalaminya tidak ada pilihan lain selain menolak dan melaporkan.

Diklat ini diikuti oleh perwakilan dari unit kerja di Setjen dan BK DPR yang terdiri dari Inspektur I dan II, Kepala Biro Umum, Kabag TU Inspektorat Utama, Kabag Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi, Kasubbag Penerangan Bagian Humas, Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan, Kasubbag Kepegawaian dan Umum, Analis Hukum, Auditor Madya, Auditor Muda, Auditor Pertama, Calon Auditor, Penyusun Bagian Kebijakan, dan Pengadministrasi Umum. ■eko/sf



Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menerima President of the Global Council for Tolerance and Peace (GCTP), Ahmed Bin Mohamed Aljarwan, di ruang kerja Ketua DPR, Jakarta, Kamis (3/5). Foto : Jayadi/hr



Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sepakat menandatangani MoU kerja sama pembuatan buku Indonesia Berparlemen "Sejarah DPR RI 1918-2018" dengan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) Universitas Indonesia (UI) di Gedung Setjen dan BK DPR RI, Jakarta, Senin (30/4). Foto: Jaka/hr



Pelantikan dan pengambilan sumpah Ketua Pengurus Koperasi dan Pengawas Koperasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (3/5). Foto: Kresno/hr



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

# Mau motor zaman now?

## IKUTI LOMBA KRITIK TERBAIK DPR

KIRIM MEME & ESSAY

MEME (gambar, karikatur, video)

ESSAY maksimal 500 kata

MASA PENGIRIMAN KARYA:

19 APRIL - 15 AGUSTUS 2018

PENGUMUMAN 29 AGUSTUS 2018

PEMENANG UTAMA: Motor Zaman Now

Juara I Rp 10 juta, Juara II, Rp 7 juta,

Juara III Rp 5 juta

SAAT PENGUMUMAN

DILANGSUNGKAN LOMBA STAND UP COMEDY

KIRIM KE:



[lombakritikterbaikDPR@gmail.com](mailto:lombakritikterbaikDPR@gmail.com)



[lombakritikterbaikDPR@yahoo.com](mailto:lombakritikterbaikDPR@yahoo.com)



[@LombaKritikTerbaikDPR](https://www.instagram.com/LombaKritikTerbaikDPR)



[@LombaKritikDPR](https://twitter.com/LombaKritikDPR)



[@lombakritikterbaikDPR](https://www.facebook.com/lombakritikterbaikDPR)